

**PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PERMODELAN SIMULASI TERPADU
EKOLOGI BAHARI BERDASARKAN PERAN WANITA
PESISIR NUSA PENIDA**

Ni Ketut Sari Adnyani

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study aims to: (1) determine the factors causing that in some coastal areas of Nusa Penida yet to activate the role of women in the management of mariculture productively; (2) to determine the customs officials Nusa Penida efforts related efforts formal legitimacy in the form of codification of customary laws that accommodates aspirations of coastal women; (3) to determine the form of human resource management of coastal women Nusa Penida in supporting bahari. Metode ecology and design research is the design of an integrated simulation system modeling, as well as various indicators of human resource management, such as soft skills related to environmental preservation in the system that have an impact on the arrangement back marine ecosystems such as coral karang. Implikasinya all forms of corporate governance, marketing, and the creation of cottage industry products by taking the raw materials from the sea can be done with eco-friendly. Analysis of integrated systems based on the determination of the detailed information generated during the process step by step. Stages of integrated systems analysis include: basic needs, needs analysis, reporting requirements, formulation of needs, identification systems, input and output as well as preliminary engineering descriptive models and flow charts. The results of the study, namely: (1) Development of water areas including economic growth requires a fundamental understanding of the work ethic as a basis in determining the policy direction and implementation of the program so that the program can succeed. The role played by women field of potential marine resource management and economics does not automatically make a woman Nusa Penida coast have the same equality with men. (2) The existence of rules and compliance with these rules will support water conservation goes well. All the planning and design management area will only be effective if there is compliance with the law. (3) the success of women's role in pemngembangan human resource management in the development program of maritime, achieving goals to marine development, satisfaction of the various parties on the construction of the pier both in terms of development, success, and in terms of utilization, how much influence the pier on the lives of coastal communities around the boat dock.

Keyword: Human Resource Management, Nusa Penida, Coast, Women.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui faktor penyebab bahwa di sebagian wilayah pesisir Nusa Penida belum mengefektifkan peran wanita dalam pengelolaan budidaya kelautan secara produktif; (2) untuk mengetahui upaya aparaturnya adat Nusa Penida terkait melakukan upaya legitimasi secara formal dalam bentuk kodifikasi peraturan adat yang mengakomodasi aspirasi wanita pesisir; (3) untuk mengetahui wujud human resource management wanita pesisir Nusa Penida dalam menunjang ekologi bahari. Metode dan desain penelitian berupa rancangan pemodelan sistem simulasi terpadu, serta berbagai indikator human resource management seperti softskill dalam pelestarian lingkungan yang terkait dalam sistem yang memberikan dampak terhadap penataan kembali ekosistem laut seperti terumbu karang. Implikasinya segala bentuk tata kelola usaha, pemasaran, dan penciptaan produk industri rumahan dengan mengambil bahan baku dari laut dapat dilakukan dengan ramah lingkungan. Analisa sistem terpadu

didasarkan pada penentuan informasi yang terperinci yang dihasilkan selama tahap demi tahap proses. Tahapan analisa sistem terpadu meliputi : kebutuhan dasar, analisa kebutuhan, persyaratan kebutuhan, formulasi kebutuhan, identifikasi system, input output serta rekayasa awal model dan diagram alir diskriptif. Hasil penelitian, yaitu: (1) Pengembangan kawasan perairan termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat membutuhkan pemahaman mendasar mengenai etos kerja sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan program dan implementasi sehingga program dapat berhasil. Besarnya peranan wanita bidang pengelolaan sumber potensial kelautan dan bidang ekonomi tidak secara otomatis membuat wanita pesisir Nusa Penida memiliki kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki. (2) Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan berjalan dengan baik. Semua perencanaan dan desain pengelolaan kawasan hanya akan berjalan efektif jika ada kepatuhan terhadap hukum. (3) keberhasilan peran wanita dalam pengembangan human resource management didalam program pembangunan kemaritiman, tercapainya sasaran terhadap pembangunan kelautan, kepuasan dari berbagai pihak atas dibangunnya dermaga baik dari segi pembangunan, keberhasilan, maupun dari segi pemanfaatan, seberapa besar pengaruh dermaga terhadap kehidupan masyarakat pesisir di sekitar dermaga kapal.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Nusa Penida, Pesisir, Wanita.

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pada kawasan pesisir Nusa Penida masih dijumpai aktifitas wanita pesisir yang membantu suami sebagai petani rumput laut, pedagang ikan, dan pengelola kawasan wisata bahari. Peran wanita pesisir ini sangat menunjang pemenuhan taraf kesejahteraan keluarga. Budidaya komoditas kelautan yang dikembangkan di Nusa Penida adalah rumput laut, dengan jenis *Eucheuma spinosum* dan *E. cottoni*. Pada kawasan pesisir Nusa Penida, budidaya rumput laut tetap dilakukan di beberapa tempat dengan lokasi di Desa Suana, Batununggul, Kutampi, Ped, dan Kampung Toyapakeh, dengan beberapa alasan yaitu (1) mempunyai potensi yang sangat cocok untuk budidaya rumput laut, (2) usaha budidaya rumput laut tidak terlalu sulit pemeliharannya dan dapat dilakukan oleh setiap nelayan, (3) usaha budidaya rumput laut memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir Nusa Penida, terutama masyarakat nelayan, (4) komoditi rumput laut mempunyai peluang ekspor sebagai bahan baku industri pengolahan, (5) sumbangan rumput laut cukup besar terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Klungkung, sebagai wilayah administratif dari Nusa Penida sehingga memberikan peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan (6) sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat pesisir Nusa Penida dalam pengembangan ekonomi swadaya berbasis kerakyatan.

Di samping, budidaya rumput laut yang dikembangkan di kawasan pesisir Nusa Penida adalah pariwisata bahari dengan memanfaatkan keindahan alam bawah airnya sebagai obyek utama pariwisata. Pulau Nusa Penida memiliki hamparan terumbu karang yang luas dengan keunikan organisme dan biodiversitas bawah lautnya, serta interaksi organisme di ekosistem terumbu karang. Aktivitas wisata yang meliputi diving dan snorkling sering dilakukan di pesisir Nusa Penida yang meliputi: Toyapakeh, Tanah Bias, Ped, Sental, Buyuk, Sampalan, Malibu, Batu Abah, Batu Lumbang, Batu Meling, Crystal Bay, Gamat Bay, dan beberapa tempat eksotik lainnya di kawasan ini.

Permasalahan yang kemudian berkembang bahwa pengelolaan kawasan bahari secara potensial, belum diimbangi oleh sistem pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem laut. Hal ini disebabkan dalam perkembangannya terjadi berbagai permasalahan karena pengelolaan kawasan pesisir Nusa Penida dengan aktifitas melaut, budidaya rumput laut dan pariwisata ternyata juga mempengaruhi keberlangsungan ekosistem yang ada di bawah laut. Kondisi tersebut menunjukkan terjadi ancaman terhadap sumberdaya pesisir, hal ini dapat dikaji

dari pandangan beberapa pakar, diantaranya: ekosistem terumbu karang yang ada di wilayah Asia Tenggara merupakan yang paling terancam di dunia. Besarnya ketergantungan manusia terhadap sumberdaya laut di seluruh Asia Tenggara telah menyebabkan eksploitasi yang berlebihan sehingga banyak terumbu karang yang terdegradasi, khususnya di dekat pusat kepadatan penduduk. Sekitar 70% penduduk di kawasan ini hidup di sekitar 50 km pesisir. Perkembangan pariwisata juga mendorong kerusakan terumbu karang. Hal ini terbukti dari penelitian di Indonesia menunjukkan telah terjadi kecenderungan pengumpulan kerang dan specimen karang yang indah secara besar-besaran untuk bisnis souvenir. Demikian juga halnya gangguan fisik lainnya yang dapat diamati di Nusa Penida adalah pecahnya karang karena terlalu seringnya perahu-perahu wisata menancapkan jangkarnya. Penyebab utama kerusakan terumbu karang adalah oleh aktivitas manusia (anthropogenic impact, misalnya melalui tangkap lebih (over-exploitation terhadap hasil laut, penggunaan teknologi yang merusak, seperti potassium cyanide bom ikan, muro ami dan lain-lain. Tanpa disadari limbah industri pariwisata juga berdampak pencemaran lingkungan laut.

Ditinjau dari segi ekonomi dan sosial, pengerusakan karang ini akan menurunkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan rusaknya ekosistem terumbu karang maka akan berdampak terhadap terjadinya ketidakseimbangan ekosistem bahari apabila hal tersebut terjadi juga akan berdampak bagi terhambatnya pembangunan di daerah yang bersangkutan. Menyikapi problematika di atas, peran wanita pesisir Nusa Penida dibutuhkan sekali dalam peran sertanya mengelola sumber daya alam hayati bahari secara produktif. Selama ini kita ketahui bersama dengan budaya purusa(sistem patriarki) yang berkembang di Bali juga mempengaruhi peran wanita di setiap aspek kehidupan. Berdasarkan fakta, dalam pengelolaan sumber daya bahari ikan tangkap, budidaya rumput laut, dan pariwisata wanita pesisir Nusa Penida hanya sebatas tenaga operasional yang berkapasitas membantu suami selepas melaut dengan menjual hasil tangkapan ikan, ikut serta dalam proses pembibitan sampai panen, dan menjual hasil panen rumput laut, serta ikut sebagai pengelola kawasan wisata. Peran wanita tidak penuh dan belum mampu diberdayakan secara lebih produktif dalam manajemen tata kelola usaha, pemasaran, maupun produksi yang berbasis industri rumahan. Menyikapi permasalahan kesenjangan ekonomi dan pengentasan ekonomi kawasan termarginalkan, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang dalam hal ini di wakili oleh pengurus PKK Desa Kuntampi Kaler, bahwa wanita memiliki keinginan untuk mengembangkan keterampilan sehingga dapat membantu pengelolaan manajemen usaha termasuk manajemen pengelolaan lingkungan kaum pria kawasan pesisir Nusa Penida sebagai ladang mencari nafkah yang perlu tetap dijaga kelestariannya secara kontinyuitas.

Hal ini selaras dengan ketentuan yuridis, lingkungan merupakan komponen yang harus selalu dilindungi sesuai amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan haruslah memperhatikan perlindungan dan peningkatan lingkungan guna terjaganya kelangsungan ekosistem. Upaya menjaga kelangsungan daya dukung sumberdaya alam pesisir dan laut Nusa Penida sangatlah tergantung dari komitmen semua elemen masyarakat dan pemangku kebijakan yang berkepentingan di Nusa Penida. Komitmen bersama untuk menjaga sumberdaya alam merupakan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun akan menjadi sebuah roh pengelolaan lingkungan yang lebih bijaksana. Nilai-nilai ini akan termanifestasi dari pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat setempat dalam memandang, mengelola, dan melestarikan lingkungannya.

Langkah yang pernah dilakukan oleh wanita pesisir Nusa Penida, yaitu mengembangkan softskill melalui pelatihan Budidaya Kelautan yang difasilitasi oleh Tim Ahli Budidaya Kelautan Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Namun, kegiatan yang berselang selama 10 hari belum sepenuhnya mengcover permasalahan pengelolaan lingkungan bahari yang perlu sentuhan tangan wanita pesisir untuk pengelolaan secara berdaya guna dan bermanfaat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian ekologi bahari.

Kajian prihal kemaritiman sudah pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi peneliti mengkajinya kembali dengan sudut pandang yang berbeda dikarenakan oleh tinjauan yang peneliti lakukan ada beberapa ketentuan di atas yang belum menunjukkan kiprah wanita dalam pengelolaan potensi bahari, walaupun sudah ada tapi masih terbatas. Jadi ke depannya akomodasi peran wanita lebih diintensifkan dengan mengakomodir aspirasi wanita bersuara melalui aliansi penggiat gender perwakilan dari kaum wanita pesisir Nusa Penida sehingga bisa memperoleh perhatian dalam mewujudkan human resource management dalam menunjang ekologi bahari.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka untuk mengetahui keterkaitan antara beberapa komponen yang terlibat dalam kaitannya dengan human resource management wanita pesisir Nusa Penida dalam pengelolaan ikan tangkap, pengembangan budidaya rumput laut dan pengembangan kegiatan pariwisata bahari terhadap kerusakan terumbu karang, sehingga diperlukan suatu metode analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh human resource management wanita pesisir Nusa Penida pada kegiatan pelestarian ekologi bahari yang ada melalui analisis sistem dan pemodelan dengan melakukan simulasi laboratorium terpadu, dengan mengkorelasikan antara pengelolaan sumberdaya alam hayati bahari secara tepat guna untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat kawasan pesisir Nusa Penida.

Penelitian ini akan diarahkan pada penyusunan dan pemodelan sistem simulasi terpadu ini, diantaranya meliputi: (1) Melakukan pemodelan simulasi dalam suatu sistem simulasi terpadu, serta berbagai indikator human resource management seperti softskill dalam pelestarian lingkungan yang terkait dalam sistem yang memberikan dampak terhadap penataan kembali ekosistem laut seperti terumbu karang. Implikasinya segala bentuk tata kelola usaha, pemasaran, dan penciptaan produk industri rumahan dengan mengambil bahan baku dari laut dapat dilakukan dengan ramah lingkungan. (2) Sebagai variabel keputusan (Decision Variable) dengan human resource management wanita pesisir Nusa Penida dalam kegiatan menjual hasil melaut, pengembangan rumput laut dan pengembangan pariwisata sebagai variabel indikator pendukung pelestarian ekologi bahari dan ketahanan pangan berbasis kelautan. Beberapa pertanyaan penelitian dalam kaitannya dengan statement of problem diantaranya yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi faktor penyebab bahwa di sebagian wilayah pesisir Nusa Penida belum mengefektifkan peran wanita dalam pengelolaan budidaya kelautan?
- 2) Bagaimanakah upaya aparatur adat Nusa Penida terkait melakukan upaya legitimasi secara formal dalam bentuk kodifikasi peraturan adat perlindungan hukum kawasan pesisir?
- 3) Bagaimanakah wujud human resource management wanita pesisir Nusa Penida dalam menunjang ekologi bahari?

Berdasarkan pertanyaan di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab bahwa di sebagian wilayah pesisir Nusa Penida belum mengefektifkan peran wanita dalam pengelolaan budidaya kelautan.
- 2) Untuk mengetahui upaya aparatur adat Nusa Penida terkait melakukan upaya legitimasi secara formal dalam bentuk kodifikasi peraturan adat tentang perlindungan hukum kawasan pesisir.
- 3) Untuk mengetahui wujud human resource management wanita pesisir Nusa Penida dalam menunjang ekologi bahari.

Urgensi dilakukannya penelitian yaitu, human resource management wanita pesisir Nusa Penida dalam hal pengelolaan lingkungan laut untuk menunjang ekologi bahari, jadi ada pembalikan cara berpikir dari masyarakat adat Nusa Penida bahwa bukan kaum laki-laki saja yang dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan, tetapi wanita juga berhak dengan pemberdayaan melalui pengembangan keterampilan secara proporsional dalam bidang manajemen sumberdaya manusia, usaha, tata kelola lingkungan, dan pemasaran yang diperoleh dari pengembangan softskill.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat merancang pemodelan sistem simulasi terpadu, serta berbagai indikator human resource management seperti softskill dalam pelestarian lingkungan yang terkait dalam sistem yang memberikan dampak terhadap penataan kembali ekosistem laut seperti terumbu karang. Implikasinya segala bentuk tata kelola usaha, pemasaran, dan penciptaan produk industri rumahan dengan mengambil bahan baku dari laut dapat dilakukan dengan ramah lingkungan. Oleh karenanya, diperlukan sejumlah data pendukung baik, berupa data primer ataupun data sekunder. Berikut ini data dan informasi yang diperlukan ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data dan Informasi yang Diperlukan

| Data | Informasi |
|--|---|
| Gambaran Umum Perairan Nusa Penida Human resource managementwanita pesisir Nusa Penida | Gambaran Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Nusa Penida Kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait dengan pengembangan kawasan pesisir Nusa Penida |

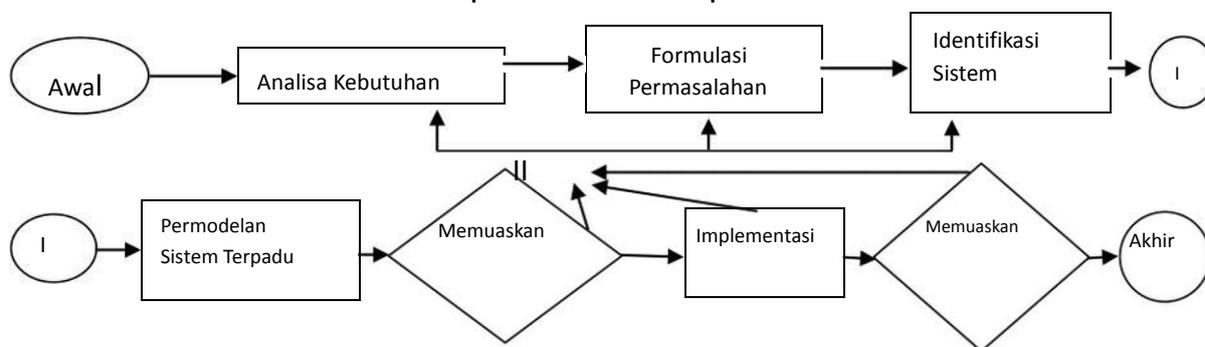
Data dan Informasi oleh peneliti dirancang dengan menggunakan teknik wawancara.

Jenis penelitian ini mengarah pada penelitian lapangan (field research. Adapun jenis data yang telah peneliti amati dan dilakukan pengkajian dalam penelitian adalah berfokus pada keberlangsungan human resource managementwanita pesisir Nusa Penida dalam menunjang ekologi bahari ditinjau dari segi kesetaraan gender.

Rancangan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sosiolegal research Berdasarkan pada sistem dan pemodelan terpadu yang akan dibangun, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap indikator human resource management seperti softskill dalam pelestarian lingkungan laut. Permodelan terpadu yang dimaksudkan merupakan suatu perwujudan dari realitas. Ini merupakan gambaran keseluruhan dari indikator yang melatar belakangi masalah sehingga melalui model maka sistem terpadu dapat dimatangkan dalam suatu proses yang disebut simulasi terpadu sehingga tahapan selanjutnya dituangkan pada sebuah diagram.

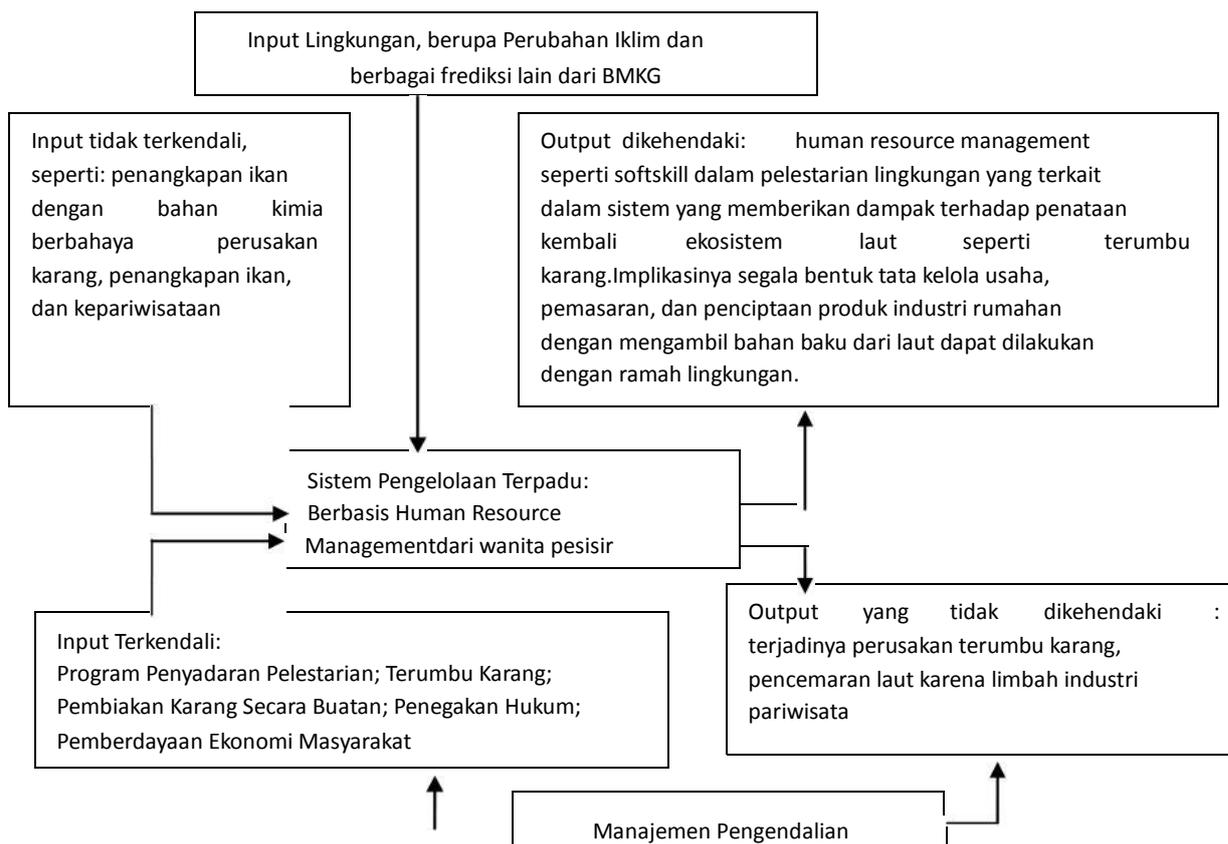
Analisa sistem terpadu didasarkan pada penentuan informasi yang terperinci yang dihasilkan selama tahap demi tahap proses. Tahapan analisa sistem terpadu meliputi : kebutuhan dasar, analisa kebutuhan, persyaratan kebutuhan, formulasi kebutuhan, identifikasi system, input outputserta rekayasa awal model dan diagram alir diskriptif.

Gambar 1. Tahapan Analisa Sistem Terpadu



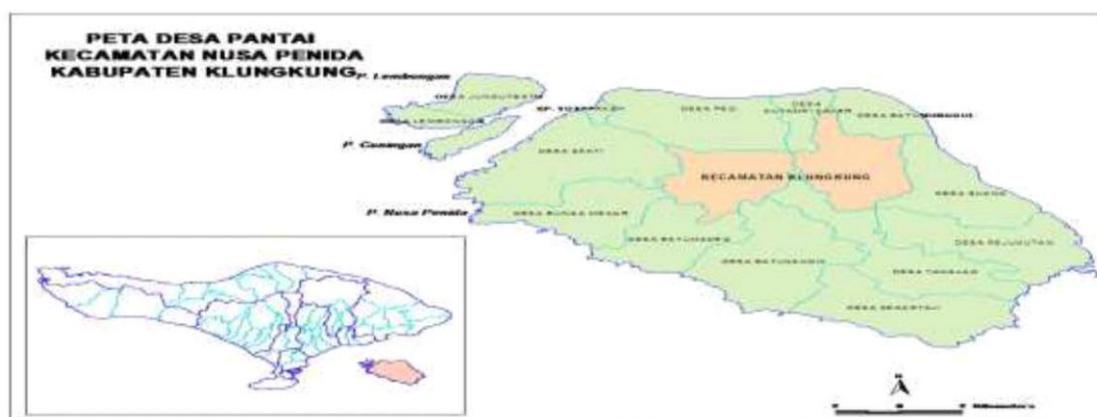
Identifikasi sistem bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sistem terpadu yang dikaji dalam bentuk diagram antara komponen masukan (input dengan sistem lingkungan dimana sistem ini menghasilkan suatu keluaran (output) baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Keterkaitan antar komponen dalam sistem terpadu yang dimaksudkan perlu dibuat untuk mengarahkan pada pembentukan model kuantitatif dalam bentuk diagram sebab akibat.

Gambar 2. Diadaptasikan dari Simplifikasi diagram kotak gelap sistem pelestarian terumbu karang oleh Romadhon



Penelitian dilakukan di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Gambar 3. Lokasi Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Melaut, budidaya rumput laut, dan pariwisata merupakan sektor primadona pada setiap daerah pesisir. Sektor ini bisa menjadi penggerak sektor lainnya (multiplier effect. Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki panorama keindahan alam laut, diimbangi oleh letak geografis yang strategis, tanah yang subur, keanekaragaman suku, budaya serta terdapat berbagai flora dan fauna yang tersebar di seluruh pulau, tentunya memiliki prospek yang cerah dan peluang untuk dikembangkan.

Salah satu pulau yang terkenal dengan sebutan “Pulau Dewata” di Indonesia, yaitu Pulau Bali adalah salah satu pulau yang sudah menjadi destinasi pariwisata dunia dengan mendatangkan wisatawan dari berbagai belahan dunia dan menunjukkan terjadinya peningkatan kunjungan setiap tahunnya yang cukup signifikan. Bali yang terkenal dengan kebudayaannya sudah menjadi sebuah ikon pariwisata dunia. Kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang begitu unik dan religius yang didasari oleh keyakinan dan agama yang dipadukan secara harmonis dengan kearifan lokal menjadikan Bali sangat diminati.

Di era globalisasi ini, industri pariwisata bagaikan industri “ekporst” yang tak berwujud dengan memberikan suatu pengalaman baru bagi pelakunya. Wisatawan adalah orang yang berkunjung ke suatu tempat yang bertujuan berekreasi, bersenang-senang dan lainnya dalam kaitannya dengan pemenuhan kepuasan, kegembiraan dan menggunakan fasilitas-fasilitas pariwisata. Indikator keberhasilan pariwisata, yaitu meningkatkan kedatangan wisatawan (arrival), meningkatkan lama tinggal para wisatawan (length of stay) dan meningkatkan pembelanjaan wisatawan yang berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat.

Tak bisa dipungkiri, pariwisata sebagai andalan perekonomian Bali menjadikan sebagian besar penduduknya hidup dengan sektor ini. Keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata yang paling mendominasi adalah kawasan pantai. Tingginya minat berkunjung ke Bali harus diantisipasi dengan membangun infrastruktur penopang pariwisata yang memadai. Inilah yang menjadikan sektor lainnya seperti pertanian, industri menengah menjadi kurang peminatnya. Pemerintah juga dalam pembangunannya selalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan memang selalu mengedepankan sektor pariwisata. Disisi lain, banyak tempat yang menjadi kawasan konservasi maupun kawasan yang steril dari pembangunan telah berubah menjadi pondok wisata atau hotel. Seperti yang terjadi di Kabupaten Klungkung, banyak sekali terjadi pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang sepatasnya menjadi kawasan konservasi maupun kawasan lindung telah berubah fungsi menjadi pondok wisata yang berjejer mewah di sepanjang pantai.

Dengan menyandang gelar sebagai salah satu lokasi wisata terbaik di dunia, Bali berusaha menjadikan para tamunya nyaman. Merujuk pada status tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali berupaya melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program pengembangan sektor pariwisata, dengan maksud agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dan lokal ke Provinsi Bali. Terbukti dari data jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2002-2006 jumlah kunjungan wisatawan ke Bali relatif stabil meskipun sektor pariwisata mendapat guncangan dengan terjadinya peristiwa Bom di Bali.

Bagi Pemerintah Provinsi Bali pada umumnya dan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada khususnya, peningkatan kunjungan wisatawan tersebut dijadikan potensi utama dalam sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Pendapatan Asli Daerah tentunya sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerahnya maka akan semakin pesat pembangunan yang akan dapat dilakukan daerah tersebut.

Bagi Pemerintah Provinsi Bali, sektor pariwisata harus terus mampu dikembangkan, seperti yang menjadi polemik sekarang ini yaitu terhadap rencana reklamasi teluk Benoa menjadi kawasan penunjang pariwisata di Bali. Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Bali pada saat ini tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Kegiatan pemanfaatan ruang oleh sektor pariwisata pada umumnya diperuntukkan untuk bangunan penunjang usaha pariwisata seperti hotel, pondok wisata, home stay restoran dan bangunan lainnya.

Sejalan dengan perkembangannya, pariwisata memberikan berbagai dampak positif maupun negatif, terhadap pembangunan di Indonesia, khususnya di Bali. Bagaikan dua sisi yang berdampingan, pariwisata di Bali memberikan dampak yang positif sekaligus negatif di bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Jumlah wisatawan yang masuk ke Bali mampu meningkatkan devisa negara. Peningkatan ekonomis ini tentunya berpengaruh positif pula pada usaha pengelolaan dan pemeliharaan industri pariwisata itu sendiri. Dana yang tersedia bisa

dipergunakan untuk penyegaran berupa perbaikan maupun pembuatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

Namun dilihat dari aspek lingkungan, pengembangan pariwisata di Bali pada saat ini jauh dari memperhatikan kondisi lingkungan. Sepintas terlihat bahwa antara pembangunan penunjang pariwisata dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan (konflik). Karena bila dilihat dari segi yang luas setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Pembangunan kawasan pariwisata seperti pondok wisata maupun hotel di sepanjang kawasan sempadan pantai menyebabkan berkurangnya fungsi kawasan sempadan pantai sebagai pencegah terjadinya abrasi. Kemajuan dan perkembangan pariwisata di Bali yang pesat disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan segala bidang menyebabkan para pelaku usaha pariwisata memanfaatkan daerah sempadan pantai untuk kegiatan-kegiatan usaha seperti pembangunan tempat rekreasi/wisata, resort hotel maupun pondok wisata.

Dari pemetaan masalah juga diketahui bahwa pelaku pariwisata memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kerusakan pantai-pantai di Bali. Pembangunan pondok wisata, hotel, resort yang melanggar batas ketentuan sempadan pantai telah membuat kawasan pantai menjadi semakin sempit, dan mereduksi vegetasi alami sebagai penahan abrasi sehingga sangat gampang daerah pantai ini tergerus tanpa ada penahan. Perkembangan pariwisata di Pulau Dewata Bali ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap pembangunan di Bali. Banyak konversi lahan dari kawasan sempadan pantai menjadi bangunan pondok wisata, hotel, restoran dan bangunan pariwisata lainnya. Tentunya ini merupakan kemunduran bagi kelangsungan lingkungan yang semakin hari semakin "dijajah".

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang sangat rentan terhadap pelanggaran dan penyalagunaan fungsi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang berakibat terhadap perubahan yang terjadi sehingga perlu adanya penegasan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Umumnya pondok wisata banyak didirikan di daerah sempadan pantai untuk menambah panorama dan keindahan tersebut.

Pada hakikatnya pantai-pantai diseluruh Indonesia mestinya terbuka untuk kepentingan umum, namun ketika hotel-hotel, resort, cottageserta pemukiman mewah (villa semakin menjamur dibangun disepanjang pantai, maka pantai tidak lagi menjadi ruang publik dan terbebas dari monopoli pihak bermodal besar.

Fenomena banyaknya bangunan-bangunan di sepanjang pantai dan kerusakan lingkungan pantai serta kepentingan nelayan yang termarginalkan harus segera mendapat perhatian dan penanganan serius. Untuk mencegah kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Daerah yang disebut sebagai sempadan pantai tersebut harus dijadikan daerah konservasi. Dalam keputusan Keppres No 32 Tahun 1990, diatur perlindungan sempadan pantai sejauh 100 meter. Dan juga Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Bali. Peraturan yang telah ada tersebut hendaknya ditaati, ditegakan dan ditindak lanjuti dengan aturan-aturan pelaksana dibawahnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pembangunan pondok kawasan pesisir Nusa Penida dari observasi yang dilakukan biasanya dilakukan di daerah yang tingkat kepadatan penduduknya relatif sedikit, daerah non-perkotaan, daerah yang relatif sepi suasananya, daerah dengan pemandangan yang hamparannya luas dan daerah dengan panorama alam yang indah. Daerah yang dimaksudkan seperti daerah dekat pantai, persawahan serta kawasan sempadan pantai. Melalui observasi tersebut, pembangunan pondok wisata di kawasan sempadan pantai yang sangat sering ditemui, dan jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Padahal Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, kawasan sempadan pantai merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam kawasan lindung.

Dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan tersebut sekaligus untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya, kesempatan berusaha dan

mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta menunjang pembangunan daerah. Semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam undang – undang Nomor 31 tahun 2004 pelabuhan perikanan merupakan tempat kegiatan pemerintahan dalam kegiatan system bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar/berlabuh dan atau bongkar muat ikan.

Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam amanat tersebut, Dinas perikanan dan kelautan kabupaten Klungkung dengan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah kabupaten Klungkung dan Departemen kelautan dan perikanan sejak tahun anggaran 2004 sampai dengan sekarang secara bertahap telah mulai membangun dermaga kapal Nusa Penida yang nantinya dapat berperan dalam mendorong aktifitas usaha perikanan tangkap mulai dari hulu sampai ke hilir.

Semenjak diberlakukannya peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan pasal 5 ayat (3) mengamanatkan bahwa pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan melalui tahapan : study, investigation, detail design construction and maintenance (SIDCOM) yang merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan dan harus dilaksanakan secara konsisten agar usaha penangkapan ikan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

Analisa sistem didasarkan pada penentuan informasi yang terperinci dan dihasilkan selama berlangsungnya proses. Lebih lanjut dapat dikembangkan menjadi suatu pernyataan tentang bagaimana sistem harus bekerja agar memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan di mana jumlah output dapat ditentukan memenuhi kriteria dan mencapai hasil yang maksimum.

Tahap analisa sistem meliputi: kebutuhan dasar masuknya peran wanita dalam pengelolaan kawasan pesisir; persyaratan kebutuhan sebagai bagian dari unsur pengelolaan secara swadaya yang dapat menjalin relasi dengan kaum laki-laki; formulasi kebutuhan pengelolaan ekologi dapat diwujudkan secara kontinuitas berdasarkan peran gender; identifikasi sistem dapat berupa input dari lingkungan, proses dari berbagai faktor pendukung, dan rekayasa awal model yang menggambarkan adanya proses simulasi terpadu anatar berbagai komponen pada tahap pengelolaan ekologi bahari.

Sumber mata pencaharian utama penduduk di Nusa Penida adalah bekerja di sektor pertanian tanaman pangan, dan sektor perikanan yang tersebar di 5 desa pantai yang meliputi: Desa Suana, Batununggul, Kutampi Kaler, Ped, dan Toyapakeh. Adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat Nusa Penida memiliki nilai budaya, sistem norma, dan kebiasaan yang dihormati dan disepakati oleh setiap warga baik tertulis berupa awig-awig ataupun yang tidak tertulis atau pararem seperti Masyarakat Bali pada umumnya.

Dilihat dari gambaran umum perairan Nusa Penida, secara umum kondisi topografi Pulau Nusa Penida tergolong landai dan berbukit. Bagian Utara Pulau merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 – 3% dan ketinggian lahan 0 – 268 m dpl dan semakin ke Selatan kemiringan lerengnya dan ketinggian semakin bertambah bergelombang. Bagian Utara Pulau meliputi Desa Toyapakeh, Ped, Kutampi Kaler, dan Batununggul. Bagian Barat pulau umumnya berbukitan bergelombang dengan ketinggian lahan berkisar 0 – 265 m dpl seperti di Desa Sakti.

Desa Suana dan Pejukutan di sebelah Timur pulau merupakan lahan bergelombang dan berbukit dengan kemiringan lahan 3 – 8%, 8 – 15%, 15 – 30%, dan 30 – 45% dan ketinggian lahan 0 – 380 m dpl. Bagian Selatan pulau yang meliputi Desa Klumpu, Tanglad, Batukandik, Batumadeg, dan Sekartaji merupakan lahan bergelombang dan berbukit dengan kemiringan lereng 15 – 30% dan 30 – 45%.

Tabel 2. Panjang Garis Pantai dan Tipologi Pantai di Pulau Nusa Penida

| No | Desa | Luas (km ²) | Panjang Pantai (km ²) | Pantai Berpasir (km ²) | Tebing Terjal (km ²) |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sakti | 1316 | 12,6 | 0,40 | 12,2 |
| 2 | Batumadeg | 1356 | 5,2 | 0 | 5,2 |
| 3 | Klumpu | 1358 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Batukandik | 2166 | 6,1 | 0 | 6,1 |
| 5 | Sekartaji | 1539 | 11,9 | 0 | 11,9 |
| 6 | Tanglad | 1524 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| 7 | Suana | 1042 | 9,1 | 8,3 | 0,8 |
| 8 | Batununggul | 1345 | 5,0 | 2,9 | 2,1 |
| 9 | Kutampi | 1314 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ped | 2115 | 5,8 | 5,8 | 0 |
| 11 | Toyapakeh | 65 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| 12 | Bunga Mekar | 1973 | 8,3 | 0 | 8,3 |
| 13 | Pejukutan | 1084 | 8,7 | 0,3 | 8,4 |
| 14 | Kutampi Kaler | 1075 | 1,9 | 1,9 | 0 |
| | JUMLAH | 19.272 | 77,5 | 20,3 | 57,2 |

Sumber : Peta Lingkungan Pantai Indonesia 2013

Pesisir Nusa Penida memiliki garis pantai sepanjang 77,5 km. Dari 14 desa yang ada di Pulau Nusa Penida, 12 desa diantaranya berbatasan dengan laut. Secara tipologi pantai di Pulau Nusa Penida terdiri dari pantai datar berpasir putih dan pantai ber-tebing terjal. Pantai datar berpasir umumnya terdapat di bagian utara dan timur pulau yang berhadapan dengan Selat Badung dan Selat Lombok. Sedangkan pantai ber-tebing terjal terdapat di bagian selatan dan barat yang berhadapan dengan Samudera Indonesia.

Berdasarkan Peta Lingkungan Pantai Indonesia 2013 dan citra Satelit Landsat dalam laporan Profil Pulau-Pulau Kecil di Propinsi Bali tahun 2003, ekosistem terumbu karang di Pulau Nusa Penida menyebar sepanjang 62,4 km atau mengelilingi 80,6 % panjang garis pantai dengan luas total mencapai 1.007 ha.

Tabel 3. Sebaran Panjang Pantai dan Luas Terumbu Karang di Nusa Penida

| No | Desa | Panjang Pantai (km) | Sebaran Terumbu Karang | |
|----|---------------|---------------------|------------------------|-----------|
| | | | Panjang (km) | Luas (ha) |
| 1 | Sakti | 12,6 | 6,2 | 49,7 |
| 2 | Batumadeg | 5,2 | 4,8 | 61,7 |
| 3 | Klumpu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Batukandik | 6,1 | 5,7 | 70,2 |
| 5 | Sekartaji | 11,9 | 7,3 | 109,9 |
| 6 | Tanglad | 1,5 | 1,5 | 10,0 |
| 7 | Suana | 9,1 | 9,1 | 124,4 |
| 8 | Batununggul | 5,0 | 5 | 87,8 |
| 9 | Kutampi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ped | 5,8 | 5,8 | 142,0 |
| 11 | Toyapakeh | 1,4 | 1,4 | 34,0 |
| 12 | Bunga Mekar | 8,3 | 5,0 | 101,0 |
| 13 | Pejukutan | 8,7 | 8,7 | 182,0 |
| 14 | Kutampi Kaler | 1,9 | 1,9 | 34,3 |
| | JUMLAH | 77,5 | 62,4 | 1,007 |

Sumber : Profil Pulau-Pulau Kecil di Propinsi Bali, 2013

Pulau Nusa Penida memiliki hamparan ekosistem padang lamun sekitar 2,7 ha yang dijumpai di Dusun Semaya, Desa Suana. Jenis lamun yang dijumpai di kawasan ini adalah dari jenis *Enhalus acoroides* dengan penutupan 98,24% dan *Thalassia sp* dengan penutupan 1,04%. Fauna makrozoobenthos yang berasosiasi dengan ekosistem padang lamun terdiri dari moluska yang relatif melimpah yaitu *Cypraea lynx*, *C. Annulus*, *C. Nigropuctata*, *C. Felina*, *Oliva sp*, dan *Litorina sp*. Jenis kepiting yang dijumpai adalah *Thalamita sp*, *Twedieia odhneri*, dan *Zosimus aeneus*

Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir Nusa Penida meliputi perikanan tangkap, budidaya kelautan, dan pariwisata. Perikanan tangkap di Nusa Penida merupakan usaha skala rumah tangga dengan armada dan peralatan yang sederhana. Armada penangkapan ikan berupa jukung motor tempel dan jukung tanpa motor, sedangkan alat tangkap meliputi jaring insang, pancing tonda, pancing rawai, pancing ulur dan bubu. Komoditas perikanan tangkap di Nusa Penida meliputi: ikan tongkol, hiu, ikan kerapu, ikan kakap, ikan sulih, dan lobster.

Budidaya komoditas kelautan yang dikembangkan di Nusa Penida adalah rumput laut, dengan jenis *Euclima spinosum* dan *E. cottoni*. Usaha budidaya rumput laut dilakukan masyarakat Nusa Penida dengan lokasi di Desa Suana, Batununggul, Kutampi, Ped, dan Kampung Toyapakeh. Komoditas rumput laut di Nusa Penida merupakan sentral penghasil rumput laut Provinsi Bali.

Species genting yang terdapat di Perairan Pulau Nusa Penida adalah kelompok Cetacean seperti lumba-lumba, duyung, dan paus yang memanfaatkan kawasan ini sebagai daerah ruaya. Lumba-lumba jenis *Delphinus delphis* ditemukan di sebelah Selatan dan Barat Pulau Lembongan. Duyung atau Dugong dugong dijumpai mencari makan di Pantai Selatan Pulau Nusa Penida pada Bulan Nopember dan Desember. Paus jenis *Rhincodon typus* sering dijumpai di sebelah Timur Pulau Nusa Penida di Perairan Selat Lombok.

Beberapa pantai di Pulau Nusa Penida menjadi lokasi penetasan telur penyu laut yang merupakan reptil laut yang dilindungi oleh undang – undang. Lokasi yang menjadi lokasi penetasan telur penyu sisik dan penyu hijau adalah Pantai Suana, Semaya, Batu Abah di Kawasan Pulau Nusa Penida.

Berdasarkan potensi sumber daya alam hayati bahari Nusa Penida, adapun hasil simulasi antara sub sistem pengembangan luas areal kawasan ikan tangkap, budidaya rumput laut, dan pengelolaan sektor pariwisata bahari pada kondisi awal menunjukkan bahwa pengelolaan wanita minim namun seiring perkembangan waktu, karena dorongan partisipasi dalam menjalin relasi dengan pihak luar adakalanya wanita membantu kaum laki-laki dalam memasarkan hasil tangkapan, ikut bertani dan panen rumput laut termasuk pemasaran objek wisata, baik untuk wisatawan domestik maupun manca negara.

Semula kaum laki-laki yang melakukan rutinitas melaut kurang sadar akan efek samping yang ditimbulkan apabila aktifitasnya tersebut dilakukan melampaui prosedur kewajaran. Justru peran wanita yang turut ambil bagian mengingatkan, karena berdasarkan data di lapangan wanita Nusa Penida sangat antusias mengikuti penyuluhan budidaya kelautan baik untuk komoditi mentah maupun olahan laut. Pada kondisi awal, terdapat tekanan dari jumlah penduduk terhadap kebutuhan sumberdaya alam bahari dapat mengalami penurunan dari segi biota maupun aliran airnya akibat tingginya aktifitas manusia melaut. Namun, hal ini dapat diatasi dengan peran wanita yang sadar lingkungan bahari. Salah satu contoh misalnya adanya pertanian rumput laut dapat mempengaruhi kondisi perairan yang over fertile. Kondisi ini dapat menunjang perkembangan bulu babi yang justru mengancam kelestarian terumbu karang.

Ada tiga bagian sub model yang dapat dikaji dalam permodelan sistem terpadu, yaitu: aktifitas kelautan, dampak fisik lingkungan, dan peran wanita pesisir.

Tabel 4. Permodelan Sistem Terpadu

| Sub Model Aktifitas Kelautan | Sub Model Dampak Lingkungan | Sub Model Peran Wanita Pesisir |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Melaut | Pertumbuhan penduduk | Pemberdayaan |
| Budidaya rumput laut | Adaptasi | Industri wisata |
| Usaha wisata bahari | Habitat perairan | Pertanian rumput laut |
| | Pencemaran lingkungan | Pengepul ikan |
| | Gelombang | Kuliner |

Berdasarkan kajian terhadap masing-masing sub model di atas, strategi pemberdayaan dan pengembangan kawasan perairan termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat membutuhkan pemahaman mendasar mengenai etos kerja sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan program dan implementasi sehingga program dapat berhasil. Besarnya peranan wanita bidang pengelolaan sumber potensial kelautan dan bidang ekonomi tidak secara otomatis membuat wanita pesisir Nusa Penida memiliki kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki. Dengan peran wanita terbatas, namun wanita dalam ruang publik mampu menjaring relasi dan komunikasi timbal balik dalam membantu kaum laki-laki dalam mengambil keputusan.

Peran para wanita pesisir Nusa Penida dalam pengelolaan potensi laut sangat besar dengan bukti antusiasme partisipasi di bidang budidaya kelautan yang ditekuni melalui penyuluhan dan praktek budidaya kelautan. Hal ini didorong oleh etos kerja yang dimiliki, sehingga optimalisasi peran wanita pesisir Nusa Penida dalam bentuk human resource management akan lebih mudah terwujud.

Ada empat prinsip dasar pada penegakan hukum yaitu : (1) Hukum adalah perjanjian pada seperangkat aturan yang tujuannya harus dianggap sebagai keinginan dan didukung oleh individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pada umumnya, hukum bertujuan untuk mempromosikan „kebiasaan baik.” Hukum bisa dilaksanakan lebih baik dan lebih efektif jika individu memahami dan menghargai alasan adanya hukum. (2) Pemasaran dan pendidikan tentang hukum pesisir. „Menjual hukum” sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Orang-orang akan jauh lebih mematuhi aturan jika mereka (a) menyadari bahwa aturan itu ada, (b) mampu memahami, dan setuju dengan, alasan yang mendasari aturan, dan (c) menyadari bahwa akan ada konsekuensi jika mereka melanggar aturan itu. Orang harus disadarkan mengapa hukum tersebut ada, serta konsekuensi dari tindakan mereka jika mereka melanggarnya. (3) Hukuman yang tepat harus dilaksanakan untuk mencegah perilaku ilegal. Penuntutan terhadap pelanggar yang terbukti secara hukum adalah penting. Proses penuntutan peradilan berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku. (4) Faktor sosial budaya harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan hukum. Atribut budaya khusus, seperti yang kadang-kadang bersifat sangat pribadi tentang hubungan antara penegak dan pelanggar, dan faktor-faktor seperti “kehilangan muka” dan menghindari dari penghinaan publik, harus dipahami dan dimasukkan ke dalam rancangan pendekatan penegakan

Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan berjalan dengan baik. Semua perencanaan dan desain pengelolaan kawasan hanya akan berjalan efektif jika ada kepatuhan terhadap hukum. Sumberdaya alam sangat rentan terhadap degradasi oleh eksploitasi, apalagi dengan motivasi masyarakat untuk alasan ekonomi dan bertahan hidup. Dengan adanya aturan yang ditegakkan maka akan meminimalisir pelanggaran dan meminimalisir tingkat kerusakan sumberdaya.

Dasar hukum yang mewajibkan perlunya dilakukan pemantauan kawasan pesisir, yakni Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Pasal 8-11), PP No.28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka

alam (Pasal 26), PP No.60 tahun 2007 tentang Konservasi sumberdaya ikan, Permen KP No.2 tahun 1999 tentang Tata cara penetapan, dan Permen KP No.30 tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Aturan lebih lanjut yang menjadi acuan kegiatan pemantauan yang dilakukan, yakni Kepmen Lingkungan Hidup (LH) No.04 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang, Kepmen LH No.115 tahun 2003 Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Kepmen LH No.51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Kepmen LH No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Dalam Kepmen LH No. 04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang diuraikan tentang persentase baku untuk menilai kondisi kerusakan terumbu karang. Kriteria rusak buruk jika persentase tutupan karang 0-24,9%, rusak sedang jika tutupan karang berkisar antara 25-49,9%. Kondisi karang baik jika tutupan karang 50-74,9% dan baik sekali ketika tutupan karang 75-100%.

UU tentang Lingkungan Hidup No.200 tahun 2004, menjelaskan tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. Kriteria baik kaya/sehat jika persentase penutupan lamun lebih besar sama dengan 60%. Kriteria kurang kaya/kurang sehat jika persentase penutupan lamun antara 30% sampai 59.9%. Sedangkan jika tutupan persentase lamun kurang dari 29.9%, maka kondisinya termasuk rusak miskin. Sedangkan kriteria baku kerusakan padang lamun menurut Kepmen LH No.200 jika luas area kerusakan lebih kecil dari 29.9% termasuk kategori kerusakan rendah, kerusakan dengan luas area antara 30% sampai 49.9% masuk kategori kerusakan sedang dan kerusakan sebesar 50% ke atas termasuk kategori tingkat kerusakan tinggi.

Begitu halnya dengan pengaturan pengelolaan sumber daya pesisir menurut hukum adat berdasarkan Paswaradan PeraremAdat Nusa Penida. Tampaknya kondisi equilibrium antara laki-laki dengan wanita merupakan kulminasi yang akan menjadi tujuan setiap masyarakat termasuk masyarakat Bali. Kondisi ini ditandai dengan semakin luwesnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Bali yang pada mulanya menganut idiologi patriarhi "tulen". Sejalan dengan itu bahwa perubahan dan dinamika merupakan suatu ciri yang sangat hakiki dalam masyarakat dan kebudayaan. Adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa "perubahan" merupakan suatu fenomena yang selalu mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan kebudayaannya. Tidak ada satu masyarakatpun yang statis secara absolut. Setiap masyarakat senantiasa mengalami transformasi dalam arti waktu, sehingga tidak akan ada satu masyarakatpun yang memiliki potret yang sama, kalau kita cermati dalam alokasi waktu yang berbeda, apakah itu masyarakat modern atau masyarakat tradisional, meskipun dengan laju perubahan yang bervariasi. Masyarakat dan kebudayaan Bali bukanlah suatu perkecualian dalam hal ini. Dengan kata lain, Bali senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa, bahkan dari hari ke hari. Sebagai sebuah komunitas, dalam masyarakat Bali sendiripun terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat menjolok dilihat dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya.

Oleh karenanya, pengawasan melibatkan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan untuk memastikan bahwa perundang-undangan nasional, kondisi akses, dan tindakan pengelolaan yang diamati. Komponen pengawasan dalam pemantauan, pengendalian dan pengawasan atau MCS (Monitoring, Control and Surveillance memerlukan personil perikanan yang tidak hanya mengumpulkan data untuk aspek pemantauan MCS selama tugas pengawasan mereka, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan dan mendidik para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan konservasi partisipatif. Orang ini harus memiliki perlengkapan yang sesuai dan fasilitas, dana operasi dan pelatihan baik untuk mendorong kepatuhan sukarela dan untuk menegakkan hukum bila diperlukan. Pengawasan biasanya merupakan komponen terbesar dan paling mahal untuk didanai. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya tidak dieksploitasi berlebihan, perburuan diminimalkan dan pengaturan pengelolaan dilaksanakan.

Data biofisik bawah air meliputi dua hal utama yakni data bio (hidup) yang meliputi seluruh organisme hidup di bawah air dan data fisika kima air yang meliputi salinitas, visibility, pH air, suhu, sedimen, dan arus. Dalam kerajaan (kingdom) hewan/Animalia banyak fhyllum yang terapat di bawah air. Menurut Wikipedia, Hewan atau animal yang kita kenal selama ini merupakan kelompok hewan bersel banyak (Metazoa).

Begitu banyak fauna yang terdapat di dalam air yang tidak akan pernah kita ketahui komposisi dan perubahannya dengan seksama tanpa adanya data yang diperoleh melalui aktivitas pemantauan bawah air. Perubahan kondisi ekosistem di dalam air tidak bisa dilepaskan dari pengaruh aktivitas atau keadaan yang ada di sekitarnya termasuk pada permukaan air. Banyaknya limpasan limbah yang terbawa bersama air sungai yang mengalir ke laut akan berpengaruh terhadap visibility, pH dan salinitas air laut. Pengaruh terhadap faktor fisik air tersebut selanjutnya akan berpengaruh terhadap kehidupan biota-biota perairan. Demikian pula pengaruh limbah pupuk pertanian yang mengalir sampai di perairan akan menyebabkan pengaruh terhadap biota laut tertentu yang secara langsung mempengaruhi rantai makanan dalam perairan

Biofisik bawah air memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga untuk mengetahui laju perubahan dan penyebab perubahan ekosistem dibutuhkan data biofisik dari seluruh komponen yang saling terkait tersebut. Dari data itu pula dapat dirumuskan cara mengatasi atau mencegah sebuah perubahan lingkungan sehingga daya dukung dan keseimbangan lingkungan dapat dipertahankan. Untuk mengukur perubahan maka dibutuhkan data awal atau T0 saat pertama kali pengambilan data dan menjadi acuan seberapa besar perubahan pada saat pengambilan data berikutnya.

Prinsip yang perlu dipegang dalam pengambilan data bawah air adalah pengambilan data awal dan data monitoring harus dilakukan pada posisi yang sama. Penentuan posisi dilakukan dengan menggunakan Global Positioning System atau GPS. Jarak deviasi yang masih dalam batas toleransi maksimal 5 meter. Person yang melakukan pemantauan bisa berbeda, yang terpenting posisi dan metode pemantauan sama. Dengan demikian perubahan bisa terlihat dengan jelas karena objek yang diamati sama.

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengetahuan, maka dirasakan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya, yang sesungguhnya sudah terdapat dalam kearifan lokal setiap daerah. Hal ini kemudian disadari ketika kenyataan menunjukkan bahwa telah banyak wilayah Indonesia yang mengalami degradasi lingkungan, dan disisi lain masih banyaknya warga masyarakat yang hidup kekurangan ditengah-tengah kelimpahan sumberdaya alam termasuk sumberdaya alam berpotensi wisata. Hal tersebut kemudian menumbuhkan semangat untuk memproteksi sumberdaya alam melalui seperangkat aturan-aturan yang disepakati bersama. Muncullah kemudian konsep perlindungan kawasan berbasis konservasi yang dikenal dengan kawasan konservasi perairan atau marine protected area(MPA).

Konsep perlindungan kawasan perairan ini lahir dan dibangun berdasarkan kearifan-kearifan lokal suatu wilayah atau daerah. Dan oleh pemerintah pusat kemudian dikuatkan melalui regulasi yang dikenal dengan KKP atau kawasan konservasi perairan. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama yakni membuat kawasan konservasi perairan daerah, dan meminta usulan untuk penetapan KKP di daerah yang belum terbentuk KKP. Sehingga saat ini sudah terdapat beberapa KKP dan KKPD di Nusantara, yang keberadaanya sedikit banyak telah membantu upaya pelestarian sumberdaya.

Keberadaan Kawasan konservasi perairan akan sangat tepat jika dimanfaatkan untuk pengelolaan pariwisata bahari. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh sekaligus jika dalam suatu kawasan konservasi dibangun pariwisata berkelanjutan. Pariwisata telah menjadi aktivitas ekonomi penting baik untuk wilayah di dalam KKP maupun sekelilingnya di seluruh dunia. Pariwisata berkelanjutan yang direncanakan dengan baik menciptakan peluang bagi pengunjung untuk belajar mengenai konservasi laut dan menghargai masyarakat lokal dengan budayanya. Pariwisata berkelanjutan dapat menghasilkan pendapatan untuk KKP dan masyarakat lokal. Setelah

masyarakat lokal merasakan manfaat dari KKP maka mereka kemudian terdorong untuk ikut melestarikan sumber daya alam.

Potensi perikanan yang baik untuk dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi berkelanjutan di antaranya budidaya ikan dan rumput laut. Ikan yang bisa dibudidayakan banyak jenisnya tergantung karakteristik wilayahnya serta nilai ekonomis jenis tersebut, misalnya kerapu, bobara/kuwe, dan jenis ikan lainnya termasuk udang, dan kepiting. Dari hasil budidaya perikanan masyarakat akan memiliki pendapatan yang baik dan berkelanjutan. Pengetahuan tentang budidaya ikan akan menjadi alternative yang sangat baik bagi masyarakat nelayan yang selama ini hanya bisa melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Kaum wanita diberikan tugas yang bersifat domestik seperti mendidik anak, memasak, mengurus keluarga, melakukan ritual keagamaan, sedangkan laki-laki disektor publik dan ekonomis. Kondisi ini sangat kontraproduktif dengan wacana dan harapan kesetaraan gender serta emansipasi wanita sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan. Akan tetapi pembalikan paradigma berpikir masyarakat Nusa Penida sudah mulai berkembang, hal ini dapat dilihat dari keberadaan wanita pesisir Nusa Penida yang memiliki kemandirian serta kesamaan hak dan kewajiban dengan laki-laki. Kondisi ini bukan berarti membuat wanita harus terus berada dalam dunia domestik, karena peran dapat dibagi menjadi dua yaitu : (1) peran gender, yaitu peran yang bisa dilakukan laki-laki dan wanita, dan (2) peran biologis/kodrati, yaitu peran yang hanya bisa dilakukan oleh kaum wanita seperti mengandung dan melahirkan. Sehingga peran gender adalah peran yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki maupun wanita termasuk dalam bidang pewarisan dan perkawinan, baik laki-laki maupun wanita berhak untuk menjadi ahli waris dan meneruskan garis keturunan keluarga.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran wanita adalah dengan pemberdayaan wanita. Salah satu upaya peningkatan peran wanita berdasarkan konvensi organisasi dan undang-undang adalah wanita dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya. Dengan meningkatkan peran wanita dalam usaha membantu menjual hasil tangkapan melaut, bertani dan panen rumput laut, dan mengelola wisata bahari. Maka mereka akan lebih memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perencana, penasihat teknis, pimpinan, dan sekaligus menjadi pengelola lingkungan hidup. Peningkatan peran wanita pesisir Nusa Penida tersebut akhirnya akan dikuatkan melalui hukum, konstitusi, administrasi, budaya, adat, tradisi, perilaku, sosial, dan ekonomi.

Yang dimaksud dengan efektifitas pada penelitian ini adalah keberhasilan peran wanita dalam pengembangan human resource management didalam program pembangunan kemaritiman, tercapainya sasaran terhadap pembangunan kelautan, kepuasan dari berbagai pihak atas dibangunnya dermaga baik dari segi pembangunan, keberhasilan, maupun dari segi pemanfaatan, seberapa besar pengaruh dermaga terhadap kehidupan masyarakat pesisir di sekitar dermaga kapal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang tangkap, Dinas perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung yang mengatakan bahwa, untuk sementara belum efektif karena nelayan masih bersifat tradisional dan produksinya masih terbatas sehingga belum maksimal pemanfaatan dermaga kapal, selain itu belum terbangunnya semua fasilitas pelabuhan seperti kolam labuh sehingga menyebabkan belum efektifnya pembangunan dermaga, selain itu belum adanya kegiatan pelelangan ikan, hal ini karena terbatasnya produksi ikan dari nelayan”.

Hal ini diperkuat lagi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa memang benar fasilitas kolam labuh belum dibangun di Dermaga kapal Nusa Penida. Lebih lanjut, jika ditinjau dari keberhasilan program, maka pembangunan Dermaga kapal ini dapat dikatakan efektif karena pemerintah dalam hal ini Dinas perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung telah berhasil membangun sebuah dermaga kapal di Nusa Penida.

Jika ditinjau dari kepuasan berbagai pihak atas pembangunan dermaga kapal baik dari segi pembangunan, keberhasilan maupun dari segi pemanfaatan, maka pangkalan pendataan ikan

dikatakan belum efektif hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa nelayan serta buruh di sekitar dermaga kapal, mereka mengatakan bahwa hanya pembangunan dermaga yang hingga saat ini dapat mereka rasakan manfaatnya, karena dulu sebelum dermaga itu dibangun, mereka melakukan aktifitas bongkar muat di beach landing sehingga kalau ada ombak besar, mereka akan kesulitan untuk membongkar muatan kapal dan selanjutnya mereka akan melakukan pekerjaan dengan kondisi pakaian yang basah diterjang ombak, setelah dermaga di bangun, mereka bisa bekerja lebih mudah dan dalam keadaan kering sehingga bisa memberikan kenyamanan disaat mereka bekerja.

Selain dermaga, pembangunan yang mungkin belum berjalan efektif adalah tempat pelelangan ikan, karena sejak awal dibangun sampai sekarang tempat itu belum berfungsi bahkan sekarang dipergunakan sebagai pos jaga dari pihak polsek sawan, setelah penulis mengkonfirmasi perihal ini kepada kepala bidang tangkap dinas perikanan dan kelautan kabupaten Klungkung, tempat pelelangan ikan belum berfungsi karena umumnya ikan hasil tangkapan nelayan langsung dibeli begitu nelayan menyandarkan perahunya oleh pedagang ikan, sehingga belum terjadi aktifitas pelelangan ikan, serta jika panen raya, umumnya nelayan lebih cenderung mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka, atau menjemur ikan di pasir yang lebih di kenal masyarakat dengan sebutan Gerang, atau membuat olahan ikan yang sering disebut Mindang.

Kemudian ada pembangunan Depo Solar, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir, kebanyakan perahu mereka menggunakan bahan bakar premium, dan mereka belum pernah membeli solar di depo solar yang disediakan, hal ini dikarenakan lebih mahalnya harga solar dibandingkan harga premium, selama ini yang membeli solar di depo solar tersebut adalah kapal atau perahu yang datang dari sepeken dan sekitarnya, masyarakat pesisir belum bisa merasakan manfaat dari depo solar tersebut,

Menurut kepala bidang tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung, ada salah satu fasilitas pokok yang belum dimiliki oleh dermaga kapal di Nusa Penida yaitu sebuah kolam pelabuhan, yang berfungsi untuk melindungi keselamatan kapal ketika berlabuh di dermaga kapal. Fasilitas kolam labuh ini belum dapat dibangun karena terbatasnya anggaran serta kurangnya lahan untuk membangun kolam labuh tersebut, sehingga kolam labuh belum bisa dibangun, namun akan diusahakan pembangunannya karena kolam labuh ini termasuk ke dalam fasilitas pokok Dermaga kapal.

Fasilitas Bangsal Pengolahan dan Lantai Jemur juga perlu diperhatikan efektifitasnya, karena sampai saat ini belum ada masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut, hal ini dikarenakan nelayan lebih memilih menjemur ikan hasil tangkapan mereka di atas kain yang kemudian ditaruh di atas pasir, berdasarkan hasil wawancara terhadap nelayan, umumnya nelayan tidak mengetahui adanya fasilitas lantai jemur tersebut, sehingga mereka masih menjemur ikan hasil tangkapan di atas pasir. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan serta kurangnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pembangunan Dermaga kapal tersebut.

Ditinjau dari besarnya pengaruh Dermaga kapal, masyarakat pesisir mengaku bahwa yang diuntungkan dari pembangunan dermaga kapal ini hanya sebagian kecil dari mereka yang menjadi buruh angkut ketika mereka tidak sedang berlaut, sementara bagi masyarakat pesisir yang lain seperti pembuat perahu dan juga para pedagang ikan kurang bisa merasakan manfaat dibangunnya Dermaga kapal di Nusa Penida. Seperti yang terungkap melalui hasil wawancara dengan pembuat perahu mengatakan bahwa, " ada atau tidak dermaga kapal ini, tidak berpengaruh sama sekali terhadap kehidupan saya, karena yang memesan atau memperbaiki perahu bukan berasal; dari sepeken, tetapi berasal dari nelayan lokal ".

Berdasarkan teori efektifitas, suatu pembangunan dikatakan efektif apabila sudah bisa mencapai tujuan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar, sementara menurut hasil penelitian yang diperoleh, bahwa masih banyaknya fasilitas pelabuhan yang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembangunan

dermaga kapal di Nusa Penida belum efektif apabila dilihat dari segi pemanfaatan fasilitas pelabuhan bahkan cenderung yang berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir hanya pembangunan dermaga saja, hal ini karena masyarakat pesisir khususnya yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh hanya merasakan manfaat dari dibangunnya fasilitas dermaga tersebut dan mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas Dermaga kapal yang lain dikarenakan kurang sosialisasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Klungkung serta kurang pedulinya masyarakat pesisir terhadap fasilitas Dermaga kapal yang lain karena selama ini mereka menganggap dermaga yang memberikan mereka pemasukan tambahan.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah, Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir di Nusa Penida mengenai fungsi serta cara pemanfaatan fasilitas Dermaga kapal serta dengan membangun fasilitas yang selama ini belum dibangun di Dermaga kapal di Nusa Penida.

Ditinjau dari sudut ekonomi sejatinya setiap investasi yang akan dibangun pemerintah hendaknya selalu diarahkan untuk mensejahterakan rakyat. Masyarakat penerima manfaat selalu akan merasakan kesejahteraan apabila kehadiran pembangunan di wilayahnya dapat diterima, menguntungkan, dan masyarakat betul-betul merasa terbantu akibat adanya proyek tersebut, artinya keberadaan proyek tersebut akan menguntungkan apabila secara sosial dapat diterima dan secara ekonomi akan menguntungkan.

Tujuan dari kajian ekonomi suatu proyek adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai atas investasi proyek tersebut, untuk melakukan penilaian terhadap kesempatan investasi yang ada, serta untuk menentukan prioritas investasi. Pada umumnya, kajian ekonomi terhadap pembangunan sebuah prasarana umum yang harus dilakukan oleh pemerintah, lebih cenderung ke arah kajian makro ekonomi karena keuntungan yang didapatkan atas biaya pembangunan tersebut (investasi) tidak seluruhnya merupakan keuntungan langsung. Masyarakatlah yang akan mendapatkan sebagian besar keuntungan, baik keuntungan berupa materi maupun berupa kemudahan – kemudahan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan nelayan dan pedagang ikan, pembangunan Dermaga kapal di Nusa Penida memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat pesisir, hal ini dikarenakan Dermaga kapal banyak membuka lapangan pekerjaan baru serta pekerjaan tambahan bagi masyarakat pesisir di Nusa Penida, selain juga sebagai penggerak perekonomian masyarakat pesisir di Nusa Penida pada khususnya. Dengan dibangunnya Dermaga kapal, nelayan yang hasil tangkapan lautnya dirasa belum bisa mencukupi kebutuhan sehari – hari, mencari tambahan penghasilan dengan menjadi buruh angkut ketika ada kapal.

Melalui Dermaga kapal tersebut dan menetap sebagai penduduk Nusa Penida dengan berprofesi sebagai nelayan dan juga buruh angkut. Dengan semakin berkembangnya Dermaga kapal di Nusa Penida, banyak pula etnis – etnis dan suku – suku lain yang berdatangan ke Nusa Penida melalui jalur laut. Interaksi sosial terjadi semenjak dibangunnya Dermaga kapal ini, masyarakat Nusa Penida akan berkumpul bersama keluarga mereka setiap hari minggu atau hari libur di Dermaga kapal ini, hanya untuk sekedar berekreasi dan melepas penat, ada juga para pemancing, yang memanfaatkan Dermaga Dermaga kapal untuk tempat mereka memancing, hal ini menjadi pemandangan yang unik karena di Dermaga kapal ini, sebagian besar masyarakat Nusa Penida berkumpul dan bersosialisasi dengan kerabat, tetangga dan masyarakat lain, bahkan tidak jarang pula para remaja dari desa lain yang datang ke Dermaga kapal ini hanya sekedar untuk bertemu dengan teman maupun kekasih mereka, kembali lagi hal ini menyebabkan semakin banyaknya bermunculan pedagang yang mengasi rejeki, ada pedagang bakso, pedagang es campur sampai pedagang makanan ringan dan pedagang jagung bakar, berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan pedagang, mereka mengaku bahwa penghasilan mereka meningkat semenjak dibangunnya Dermaga kapal ini, karena pembangunan Dermaga kapal ini menarik perhatian warga Nusa Penida bahkan dijadikan tempat rekreasi keluarga, sehingga mereka juga bisa mengais rejeki dengan berdagang makanan dan minuman di Dermaga kapal ini.

Letak Dermaga kapal Nusa Penida berdekatan dengan pasar. Pasar ini secara tidak langsung sebagai tempat pertemuan penduduk Nusa Penida dengan penduduk sekitarnya dalam bidang ekonomi sekaligus bersifat sosial. Di dalam pasar terjadi berbagai interaksi masyarakat dari berbagai budaya, etnis, agama sehingga dengan seiringnya waktu dengan sering adanya interaksi dari berbagai asal – usul masyarakat maka timbul perubahan sosial masyarakat. Etnis – etnis yang ada di Nusa Penida seperti etnis madura, jawa, dan etnis sasak.

Dampak ekonomi lain bisa dilihat perkembangannya adalah semakin banyaknya rumah singgah atau kos yang ada di kawasan Dermaga kapal Nusa Penida, rumah singgah ini biasanya disewa oleh awak kapal yang sedang berlabuh di Dermaga kapal, umumnya mereka lelah dan ingin beristirahat sehingga aktifitas bongkar muat barang mereka lakukan pada esok harinya. Namun keberadaan rumah singgah ini tidak banyak masyarakat pesisir yang mengetahuinya karena pemilik rumah singgah ini enggan menyebutkan dirinya membangun kos karena sistem mereka menerima tamu yang datang kepada mereka lalu esok harinya pergi dengan meninggalkan beberapa lembar uang.

Selain berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan sosial, ternyata dermaga kapal juga berpengaruh terhadap kehidupan budaya, hal ini bisa kita lihat, ketika salah satu umat hindu di pabean Nusa Penida mengadakan upacara agama, umat muslim akan datang dengan menggunakan pakaian adat bali serta membawa delokan hal ini membuktikan bahwa toleransi umat beragama di Nusa Penida berjalan dengan baik, apalagi ketika Dermaga kapal ini dibangun, jumlah penduduk muslim di Nusa Penida bertambah, dengan demikian umat muslim dan umat hidup hidup bertoleransi.

Dermaga kapal tidak hanya menyebabkan dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi masyarakat, dengan banyaknya jumlah pedagang, maka semakin banyak pula sampah yang menumpuk di sekitar pelabuhan, selain merusak pemandangan pelabuhan, akibat yang paling fatal adalah kesehatan lingkungan menjadi tercemar, karena masyarakat sekitar pelabuhan kurang sadar terhadap kesehatan lingkungan. Selain itu kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap penduduk pendatang yang terkesan dengan mudah masuk ke Nusa Penida lewat dermaga kapal, hal ini bisa mengancam keselamatan dan kestabilan karena kita tidak pernah tahu, tujuan sebenarnya penumpang dari sepeken datang ke bali melalui dermaga kapal di Nusa Penida. Berdasarkan data di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa pembangunan Dermaga kapal di Nusa Penida berimplikasi terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat pesisir.

Wujud human resource management peran wanita pesisir Nusa Penida dalam bentuk aktualisasi melalui upaya-upaya yang ditempuh untuk melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan kawasan pesisir Nusa Penida, diantaranya dilakukan oleh :

a) Upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung

Selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan berbagai upaya melalui beberapa tindakan dalam melindungi kawasan pesisir dari kegiatan pembangunan pondok. Upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung tersebut dapat dilaksanakan oleh beberapa forum Aliansi Wanita Pencinta Lingkungan, Instansi, Tim dan Satuan Kerja yang ada pada Kabupaten Klungkung.

Upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melindungi kawasan sempadan pantai dari kegiatan pembangunan pondok wisata di pesisir Nusa Penida memang tidak dapat dilepaskan pada kegiatan pengaturan tata ruang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa: "Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang."

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum melalui proses pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan pantai dari pembangunan pondok wisata melalui penetapan perizinan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung tersebut didasarkan pada

kewenangannya dalam proses penerbitan salah satu persyaratan izin pembangunan pondok wisata maupun hotel, yaitu dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL dan UPL-UKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Romadhon.2014. Sistem Dinamik Pengaruh Budidaya Rumput Laut Dan Jumlah Penduduk Terhadap Degradasi Terumbu Karang (Studi Kasus Pulau Poteran – Madura). Madura: Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo.
- Agussalim. 2014. Foto Praktek Lapang Program Studi Ilmu Kelautan di Waigeo Raja Ampat, tahun 2014. PPS. Ambon: Unpatti.
- Anonim, 2013. Melaksanakan Aturan dan Perundang-Undangan Perikanan. Bahan Ajar Diklat Konservasi (Perikanan Berkelanjutan).
- English, S.C. Wilkinson, and v. Baker, 2002. Survey Manual for Tropical Marine Resources, Australia Institute of Marine Science. Townsville.
- Lasmawan, W. 2002. Sasih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Tradisional Bali. Laporan Penelitian. Singaraja: FKIP UNUD.
- Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk.Jakarta: Grasindo.
- Murniati, A.& Nunuk P. 2004. Getar Gender: Wanita Indonesia dalam Perspektif Agama , Budaya, dan Keluarga. Magelang: Indonesiatara.
- Prasetia, I Nyoman Dodik. 2010. Struktur Komunitas Terumbu Karang Pulau Serangan Pasca Reklamasi. Jurnal Lingkungan Tropis, Vol.5., No.2., Bandung.
- _____. 2011. Potensi dan Kondisi Terumbu Karang di Kawasan Wisata Lovina. Jurnal Lingkungan Tropis.Vol.6., No.1.,Bandung.
- Windari, Ratna Artha. 2011.Korelasi Yuridis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) terhadap Keajegan Alam Bali. Jurnal Media Komunikasi FIS. Edisi Khusus PPKn Vol.10, No.3, Desember 2011.
- <http://aguswi-kkp.com/category/karya-tulis/Agussalim> Powered by WordPress and theme by gazpo.comAgussalim,Pergeseran Base Line Sumber Daya Pesisir dan Laut. Diakses pada hari Rabu, tgl 16 Maret 2016. Pukul 20:10.
- www.menlh.go.id. Kepmen Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.
- www.menlh.go.id. Kepmen Lingkungan Hidup No.200 tahun 2004, tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.